

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

Grand Theory (teori besar) dalam penelitian ini adalah ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan semua departemen yang ada di bawahnya.¹⁷ Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

B. Laporan Keuangan Pemerintah Desa

1. Pengertian Laporan Keuangan Desa

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa

¹⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 3

pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah.
- c. Masing masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
- d. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya.¹⁸

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009), hal. 159

ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut¹⁹:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dengan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “*Standar Akuntansi Pemerintahan*”

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- 3) Tepat waktu, artinya informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

b. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.²⁰

c. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi juga hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “*Standar Akuntansi Pemerintahan*”

- 1) Penyajian jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - 3) Netralitas, artinya Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- d. Dapat dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
- e. Dapat dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.²¹

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

1. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengertian sistem pengendalian internal menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.²² Sistem pengendalian internal yang dianut pemerintah Indonesia salah satunya berasal dari COSO (*Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission*) yaitu komisi yang bergerak di bidang manajemen organisasi. Menurut COSO pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.²³

²² Bambang Hartadi, *Auditing: Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan Edisi 1*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hal. 121

²³ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010), hal. 147

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu sistem untuk melindungi aset perusahaan, mencegah dan mendeteksi penggelapan aset perusahaan atau organisasi melalui seperangkat koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi dan dijalankan dengan metode dan ukuran yang tepat.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kekayaan organisasi
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- 3) Mendorong efisiensi
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian internal dapat mencegah kerugian pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal dapat menyediakan informasi tentang penilaian kinerja manajemen perusahaan dan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.²⁴

²⁴ Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 450.

c. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Dalam pengendalian internal Kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission*) terdapat beberapa prinsip pengendalian internal dalam komponen pengendalian internal:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja meliputi beberapa prinsip yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal.²⁵

²⁵ Muhammad Yusuf, "Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk", *Tesis Publikasi-Universitas Bina Utama*. Jakarta, 2013), hal. 25

2. Penilaian Risiko

Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap risiko (*Risk Identification*) diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Risiko yang biasa dihadapi meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko hukum/legal.²⁶

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi menjadi 2 jenis tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko berlangsung sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan mitigasi berfungsi untuk mengurangi dampak yang terjadi. Tindakan-tindakan tersebut juga

²⁶ Muhammad Yusuf, "Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk", *Tesis Publikasi-Universitas Bina Utama*. Jakarta, 2013), hal. 26

harus dilakukan evaluasi sehingga dapat dinilai keefektifan serta keefisienan tindakan tersebut.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang berkualitas tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Penyampaian informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima informasi.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan (*monitoring*) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemantauan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pemantauan berkelanjutan (*on going monitoring*), evaluasi yang terpisah (*separate evaluation*) dan tindak lanjut atas temuan audit.²⁷

²⁷ Muhammad Yusuf, "Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk", *Tesis Publikasi-Universitas Bina Utama*. Jakarta, 2013), hal. 26

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah karakteristik dasar atau kemampuan sumber daya manusia dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM.

Menurut Mangkunegara kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk

²⁸ Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 40

mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Ketidaksesuaian dalam kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas.

b. Tujuan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dan Thoha penggunaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah untuk tujuan pembentukan pekerjaan (*job design*), evaluasi pekerjaan (*job evaluation*), rekrutmen dan seleksi (*recruitment and selection*), pembentukan dan pengembangan organisasi (*organization design and development*), serta membentuk dan memperkuat nilai dan budaya (*company culture*).²⁹

c. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya adalah tolak ukur yang dapat dijadikan patokan atau perbandingan agar bisa mengetahui sumber daya yang berkualitas. Dengan adanya batasan atau tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi sumber daya manusia. Menurut

²⁹ Parulian Hutapea dan Thoha, *Kompetensi Komunikasi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 16-18

Sedarmayanti³⁰ karakteristik sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Mencakup pengetahuan mengenai ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan lainnya yang terkait, pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan organisasi.

2) Keterampilan (*skill*)

Mencakup keterampilan teknis dan fungsional, keterampilan intelektual, keterampilan berorganisasi, keterampilan personal, keterampilan komunikasi dan intrapersonal.

3) Sikap (*attitude*)

Memiliki komitmen untuk kepentingan publik dan sensitif terhadap tanggungjawab sosial, pengembangan diri dan terus belajar, dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai, mentaati hukuman dan peraturan yang berlaku.

3. Pemahaman Akuntansi

a. Pengertian Pemahaman Akuntansi

Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan

³⁰ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Mandar Maju, 2014), hal. 286

pemahaman adalah proses, cara pembuatan memahami atau memahamkan.³¹ Dari pengertian ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang memiliki kepandaian dan mengerti benar tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang di terapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan.³²

Adapun proses atau siklus akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

1) Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi ini yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

2) Analisis Bukti Transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi

³¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Perwakilan Nasional Edisi Ketiga: Balai Pustaka, 2006)

³² Safrida Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Banda Aceh)", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 2 Tahun 2010

tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan. Mencatat data transaksi dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

3) Mengelompokkan dan Pengikhtisarkan

Data yang di catat (*posting*) dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan akan transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya akun masing-masing. Kegiatan ini disebut dengan posting.

4) Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.³³

³³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 318

b. Indikator Pemahaman Akuntansi

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah indikator dari pemahaman akuntansi adalah:

- 1) Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi.

Pemahaman akuntansi sangat diperlukan dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Paham terhadap komponen-komponen laporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi merupakan suatu keharusan seseorang dalam menyusun laporan keuangan.

- 2) Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan

Orang yang akan menyusun suatu laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan.³⁴

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan di berbagai organisasi.³⁵ Sistem teknologi informasi sangat mudah diakses, dan memberikan informasi yang akurat nantinya akan berdampak pada pelaksanaan operasi di semua sektor

Pemanfaatan teknologi yang dimaksud adalah menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.³⁶ Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan serta jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Selain sebagai teknologi, komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga dapat berfungsi sebagai teknologi komunikasi guna penyebaran informasi. Teknologi informasi berguna dalam proses meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan pengumpulan, komputasi, penyimpanan dan komunikasi, dapat memberdayakan eksekutif dan pemangku

³⁵ Mahayani, Sulindawati dan Dewi, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana)". *E Jurnal Universitas Pendidikan Ganेशha*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017

³⁶ Setyowati, Ishtika dan Pratiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang", *Jurnal Kinerja* Vol. 20 No.2 Tahun 2016

kepentingan dalam membuat keputusan yang berkualitas.³⁷

Pemanfaatan teknologi sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, dan dapat terhindar dari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kemajuan dari teknologi informasi memudahkan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan atau potensi dalam hal ketepatan, konsistensi, keandalan, dan kemampuan menyimpan data yang besar.³⁸

b. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi menurut Wardani & Ika³⁹ adalah sebagai berikut:

- 1) Proses kerja secara elektronik
- 2) Pengolahan dan penyimpanan data keuangan
- 3) Pengolahan informasi dengan jaringan internet

³⁷ Abraham, "Information Technology , an Enabler in Corporate Governance", *Corporate Governance: The International Journal of Bussines in Society*, 12 (3 ISSN 1472-0701), 281-291, 2012

³⁸ Setyowati, Ishtika dan Pratiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang", *Jurnal Kinerja* Vol. 20 No.2 Tahun 2016

³⁹ Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten", *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 2 Tahun 2017

- 4) Sistem manajemen
- 5) Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer.

D. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01

Tujuan PSAP 01 adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.⁴⁰ Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format

⁴⁰ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”, (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2019), hal. 33

ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing masing.

1. Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna disini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak anggota atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah 2 daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan 3 negara/daerah.⁴¹

2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

⁴¹ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang “*Penyajian Laporan Keuangan...*”, hal. 33

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi.⁴²

3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Anggaranary reports*) dan laporan finansial.⁴³ Komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

⁴² Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”..., hal. 39-40

⁴³ *Ibid.*, hal. 40

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.⁴⁴

4. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan jika perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 54-55

- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan.
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan.
- d. Mata uang pelaporan.
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.⁴⁵

5. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan

⁴⁵ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,hal. 42-43

adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.⁴⁶

6. Tanggal Efektif

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akruwal paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.⁴⁷

E. Teori Hubungan Variabel

Peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen (X_1 terhadap Y , X_2 terhadap Y , X_3 terhadap Y dan X_4 terhadap Y) sebelum peneliti melakukan pengukuran mengenai pengaruh dari setiap variabelnya. Hal ini dapat dilakukan melalui teori faktor, teori ini dapat digunakan sebagai dasar dari dilakukannya penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan hubungan dari masing-masing variabel:

⁴⁶ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,hal. 43

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 57

1. Hubungan Sistem Pengendalian Internal (X₁) dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Dalam sebuah lembaga dibutuhkan adanya pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pada lembaga tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan dalam kegiatannya. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maka dibutuhkan adanya pengendalian internal yang efektif. Dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan menjamin keakuratan data dan akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁸

Apabila sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Dengan demikian, sistem pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahayani yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.⁴⁹

⁴⁸ Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2...*, hal. 450

⁴⁹ Mahayani, Sulindawati dan Dewi, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana)", *E Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017

2. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kompetensi sumber daya manusia menurut Setyowati ialah kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan tugas serta tanggungjawab yang telah diberikan dengan berbagai bekal seperti pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi mencakup kapasitasnya, yaitu mencakup kemampuan individu, kemampuan suatu organisasi, atau bahkan suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya guna mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Peran sumber daya manusia sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan tujuan sektor publik. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten, nantinya akan mampu memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Maka dari itu sumber daya manusia harus berkompeten dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tanggungjawab, dalam hal ini yaitu akuntansi dan keuangan yang memiliki dampak pada pengelolaan keuangan.⁵⁰

⁵⁰ Setyowati, Ishtika dan Pratiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang", *Jurnal Kinerja* Vol. 20 No.2 Tahun 2016

3. Hubungan Pemahaman Akuntansi (X₃) dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan.⁵¹ Hal ini mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu di jalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Wasman yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.⁵²

⁵¹ Safrida Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Banda Aceh)", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 2 Tahun 2010

⁵² Meilani Purwanti dan Wasman, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 4 No 3 Tahun 2014

4. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₄) dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor yang diduga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah penggunaan aplikasi sistem keuangan, seperti SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) yang dikembangkan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat mendukung proses pelaporan keuangan dengan mempercepat proses pengolahan data transaksi, serta dapat menghindari dan meminimalisir kesalahan. Dengan proses penyusunan yang lebih cepat dan kesalahan yang lebih minimal diharapkan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dari segi penyampaian tepat waktu dan akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu akan sangat bermanfaat. Selain tepat waktu dan andal. Laporan keuangan juga dapat dibandingkan antar desa. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi SisKeuDes diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Teori di atas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Sukriani yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.⁵³

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan skripsi ini baik dari segi teori maupun konseptual. Berikut ini penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

Penelitian Lestari, Hariyono dan Abdullah⁵⁴ yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial kompetensi staf akuntansi, penguasaan teknologi informasi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, peran audit internal, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Desa se Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, menguji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Desa se Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi staf akuntansi, penguasaan teknologi informasi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, peran audit internal dan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu laporan keuangan desa, mutu laporan keuangan berpengaruh

⁵³ Sukriani, M. Devi dan Wahyuni, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes di Kecamatan Negara", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Undiksha*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2018

⁵⁴ Aning Lestari, Hariyono dan Syahriar Abdullah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten", *Jurnal Widya Ganecwara* Vol. 11 No.1 Tahun 2021

positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan saja akan tetapi penelitian terdahulu juga menguji faktor tersebut dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian Praptiningsih dan Yetty⁵⁵ yang bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas pengelolaan dan administrasi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menggunakan metode yang sama yaitu metode kuantitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan pemerintah desa meliputi

⁵⁵ Praptiningsih dan Fitri Yetty, “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan Desa”, *Jurnal Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* Vol. 5 No 1 Tahun 2020

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem akuntansi keuangan sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak menguji variabel pengawasan keuangan dan sistem akuntansinya.

Penelitian Riyanita dan Widiastuti⁵⁶ yang bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan desa di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan adalah sama-sama menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan pemerintah daerah desa dan juga menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian terdahulu tidak menguji faktor kompetensi sumber daya manusia dan perbedaan terletak pada lokasi and objek penelitiannya.

Penelitian Aziiz dan Prastiti⁵⁷ yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas dana desa.

⁵⁶ Alvina Ghina Riyanita, "Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2020

⁵⁷ Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2019

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Implikasi praktis hasil penelitian ini bagi aparat pemerintahan adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat desa melalui pelatihan Siskeudes dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Persamaannya adalah sama-sama menguji tentang keuangan dana desa dan menggunakan metode yang sama. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya.

Penelitian Prasetya, Prayudi dan Diatmika⁵⁸ yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kompetensi sumber daya, pemahaman dan pengawasan terhadap kualitas sistem keuangan desa di Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya berpengaruh signifikan namun dalam arah yang negatif terhadap kualitas penerapan Siskeudes, variabel pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penerapan Siskeudes, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penerapan Siskeudes. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menguji tentang keuangan pemerintah

⁵⁸ Kadek Yani Bimarta Prasetya, Made Aristia Prayudi, dan Putu Gede Diatmika, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Pemahaman, dan Pengawasan terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng". *E-Jurnal SI Akuntansi* Vol. 8 No. 2 Tahun 2017

desa dan menggunakan metode yang sama yaitu metode kuantitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem keuangan pemerintah desa dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian Setyowati, Isthika dan Pratiwi⁵⁹ yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan variabel peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menggunakan metode yang sama yaitu metode kuantitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah

⁵⁹ Setyowati, Isthika dan Pratiwi, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang*", Jurnal Kinerja Vol. 20 No.2 Tahun 2016

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dalam lingkup yang lebih kecil yaitu pemerintah desa.

Penelitian Oktarina dkk,⁶⁰ yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang, Studi kasus pada BPKAD Kota Semarang tahun 2014. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang. Persamaan sama-sama menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup ruang lingkup yang lebih sempit yaitu fokus pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa saja.

Penelitian Purwanti dan Wasman⁶¹ yang bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan

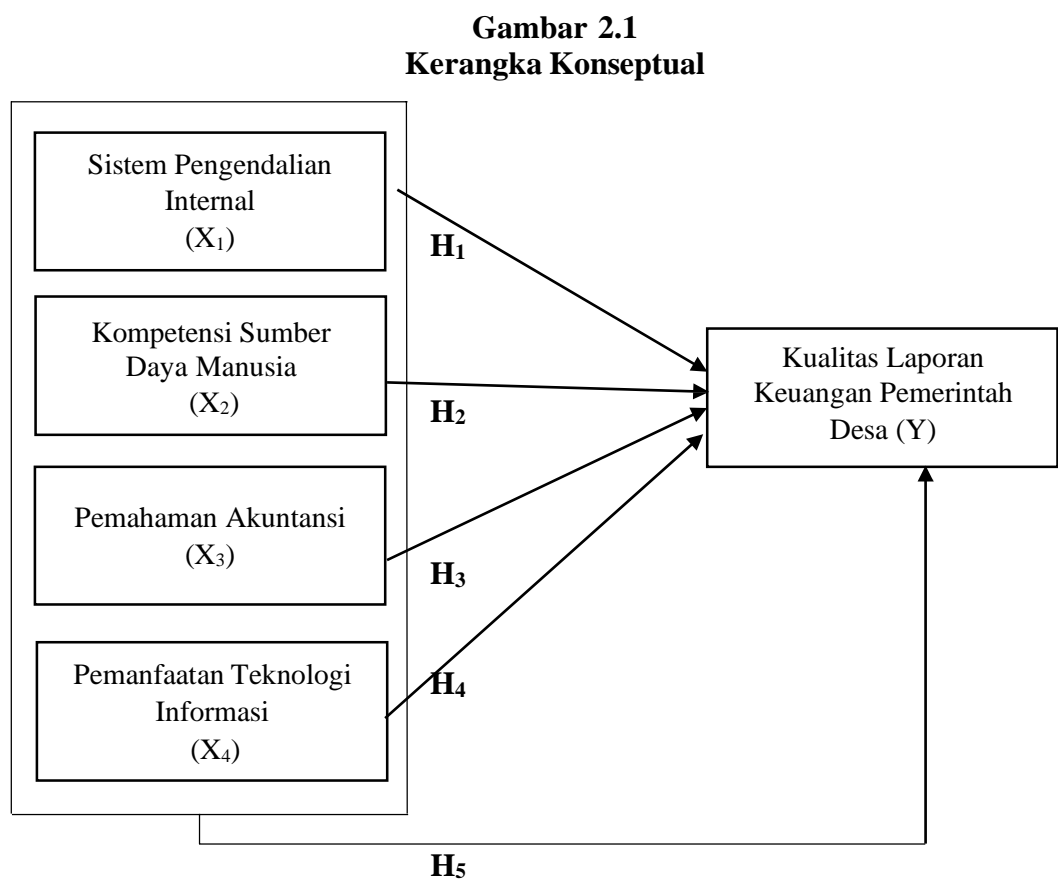
⁶⁰ Mia Oktarina, Kharis Raharjo dan Rita Andini, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang”, *Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2 Maret 2016

⁶¹ Meilani Purwanti dan Wasman, “ Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 4 No 3 Tahun 2014

peran internal audit secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan adalah sama-sama menguji faktor pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, metode penelitian dan teknik analisis data yang digunakan. Perbedaan terletak pada objek penelitian dan variabel lain yang digunakan yaitu peran internal audit dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Gambar oleh Peneliti, 2021

Keterangan:

Sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel bebas yang bersifat resiprokal dan tidak bisa dianalisis karena posisi adalah sejajar. Sistem pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Pemahaman akuntansi berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut penjelasan dari masing-masing hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) didukung oleh teori Bastian⁶², PP No 71 Tahun 2010⁶³ dan penelitian yang dilakukan oleh Riyanita dan Widiastuti⁶⁴ dan Mahayani⁶⁵.
2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) didukung oleh teori Mankunegara⁶⁶ PP No 71

⁶² Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2...*, hal. 450

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”

⁶⁴ Alvina Ghina Riyanita, “Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2020

⁶⁵ Mahayani, Sulindawati dan Dewi, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana)”, *E Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017

⁶⁶ Mangkunegara, “*Evaluasi Kinerja SDM*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal.

Tahun 2010⁶⁷ dan penelitian yang dilakukan oleh Praptiningsih dan Yetty⁶⁸, Prasetya, Prayudi dan Diatmika⁶⁹ dan penelitian Setyowati⁷⁰

3. Pengaruh pemahaman akuntansi (X₃) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) didukung oleh teori Safrida⁷¹ dan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya, Prayudi dan Diatmika⁷² dan Purwanti dan Wasman⁷³.
4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X₄) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) didukung oleh teori Abraham⁷⁴ dan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati⁷⁵ dan Sukriani⁷⁶.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”

⁶⁸ Praptiningsih dan Fitri Yetty, “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan Desa”, *Jurnal Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* Vol. 5 No 1 Tahun 2020

⁶⁹ Kadek Yani Bimarta Prasetya, Made Aristia Prayudi, dan Putu Gede Diatmika, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Pemahaman, dan Pengawasan terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng”. *E-Jurnal SI Akuntansi* Vol. 8 No. 2 Tahun 2017

⁷⁰ Setyowati, Ishtika dan Pratiwi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang”, *Jurnal Kinerja* Vol. 20 No.2 Tahun 2016

⁷¹ Safrida Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Banda Aceh)”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 2 Tahun 2010

⁷² Kadek Yani Bimarta Prasetya, Made Aristia Prayudi, dan Putu Gede Diatmika, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Pemahaman, dan Pengawasan terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng”. *E-Jurnal SI Akuntansi* Vol. 8 No. 2 Tahun 2017

⁷³ Meilani Purwanti dan Wasman, “ Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 4 No 3 Tahun 2014

⁷⁴ Abraham, “Information Technology , an Enabler in Corporate Governance”, *Corporate Governance: The International Journal of Bussines in Society*, 12 (3 ISSN 1472-0701), 281-291, 2012

⁷⁵ Setyowati, Ishtika dan Pratiwi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang”, *Jurnal Kinerja* Vol. 20 No.2 Tahun 2016

⁷⁶ Sukriani, M. Devi dan Wahyuni, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes di Kecamatan Negara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Undiksha*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2018

H. Mapping Variabel, Teori dan Indikator

Tabel 2.1
Mapping Variabel Sistem Pengendalian Internal

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No Item
Sistem Pengendalian Internal (X ₁)	Lingkungan Pengendalian	Penegakan integritas dan etika	Likert	1
		Adanya pimpinan manajemen		2
		Pembentukan struktur organisasi		3
		Penyusunan dan penerapan kebijakan		4
		Perwujudan peran aparat pengawasan		5
	Penilaian Risiko	Risiko internal dan Eksternal	Likert	6
		Identifikasi dan analisis risiko.		7
	Aktivitas Pengendalian	Arah pimpinan	Likert	8
		Kegiatan pengendalian internal		9
		Efektivitas dan efisiensi		10
	Informasi dan Komunikasi	Identifikasi	Likert	11
		Mencatat		12
		Menginformasikan		13
	Pemantauan Pengendalian Internal	Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan	Likert	14
		Tindak lanjut atas rekomendasi		15

Tabel 2.2
Mapping Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No Item
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂) ⁷⁷	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	Pengetahuan akuntansi	Likert	16
		Pengetahuan penyusunan laporan keuangan		17
	Ketrampilan (<i>Skill</i>)	Ketrampilan teknis	Likert	18
		Ketrampilan fungsional		19
		Ketrampilan intelektual		20
		Ketrampilan personal maupun interpersonal		21
	Sikap (<i>Attitude</i>)	Komitmen untuk kepentingan publik,	Likert	22
		Sensitivitas terhadap tanggungjawab sosial		23
		Dapat diandalkan, tepat waktu dan patuh terhadap peraturan		24

⁷⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Mandar Maju, 2014), hal. 286

Tabel 2.3
Mapping Variabel Pemahaman Akuntansi

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No Item
Pemahaman Akuntansi (X ₃) ⁷⁸	Komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi	Paham jenis dan komponen laporan keuangan	Likert	25
		Paham prinsip akuntansi		26
	Pengakuan unsur laporan keuangan	Paham pengakuan atas transaksi akuntansi	Likert	27

Tabel 2.4
Mapping Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No Item
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄) ⁷⁹	Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi secara terpadu untuk menyederhanakan akses antar unit	Proses kerja secara elektronik	Likert	28
		Pengolahan dan penyimpanan data keuangan berbasis komputer	Likert	29
		Pengolahan informasi dengan jaringan internet	Likert	30
		Sistem manajemen	Likert	31
		Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer	Likert	32

Tabel 2.5
Mapping Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No Item
Kualitas Laporan Keuangan (Y) ⁸⁰	Relevan	Memiliki umpan balik	Likert	33
		Memiliki manfaat prediktif		34
		Tepat waktu		35
	Lengkap	Mencakup semua informasi akuntansi	Likert	36
		Penyajian berdasarkan standar yang berlaku		37
	Andal	Jujur dan wajar	Likert	38
		Dapat diverifikasi dan netral		39
	Dapat dibandingkan	Periode sebelumnya dan entitas lain	Likert	40
	Dapat dipahami	Dapat dipahami oleh pengguna	Likert	41
				Dinyatakan dalam bentuk serta istilah sesuai standar yang berlaku

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁷⁹ Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten", *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 2 Tahun 2017

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan"

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu penjelasan yang bersifat sementara dalam bentuk pernyataan antara hubungan dua variabel atau lebih yang harus dilakukan uji terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran mengenai masalah yang diteliti.⁸¹ Perumusan hipotesis dalam penelitian berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:

H₁ Sistem pengendalian internal diduga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung.

H₂ Kompetensi sumber daya manusia diduga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung.

H₃ Pemahaman akuntansi diduga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung.

H₄ Pemanfaatan teknologi informasi diduga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung.

H₅ Sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi diduga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung.

⁸¹ Suprpto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 27